

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS
UPTD RSUD dr. H. JUSUF SK

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK

Permasalahan yang dihadapi UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK Kalimantan Utara dalam upaya pengembangan pelayanan bidang kesehatan yang didasarkan pada fungsi bidang pelayanan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pencegahan dan penanggulangan penyakit berpotensi kejadian luar biasa (KLB) belum sesuai standar	Peningkatan kasus Covid-19 di Kalimantan Utara	- Sistem pelayanan kesehatan primer sudah terbangun menangani KLB penyakit biasa, namun belum siap menangani <i>New Emerging Disease</i> yang infeksius dan diagnosa PCR
2	Masih rendahnya kualitas layanan kesehatan	Fasilitas kesehatan dasar dan rujukan belum mampu memberikan pelayanan sesuai standar yang ditetapkan	- Jenis dan jumlah Sarana, Prasarana dan Alat kesehatan masih ada yang kurang memenuhi standar
			- Kurangnya Komitmen manajemen RS untuk ikut akreditasi
			- Keterbatasan jumlah SDM di Rumah Sakit untuk memenuhi standar minimal sesuai klasifikasi jenis RS - Tingkat Kepatuhan RS untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan dalam ijin operasional RS masih rendah

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
(1)	(2)	(3)	(4)
			(Kelengkapan SIP/SIK, Ijin IPAL, TPS B3, Ijin Listrik, Ijin Genset dll)
		Sistem Informasi Rumah Sakit yang belum Terintegrasi	Banyaknya Aplikasi Sistem Informasi yang digunakan tetapi tidak saling terintegrasi
		Implementasi Regulasi Mutu Pelayanan RS Sesuai Akreditasi Snars belum optimal	Budaya Kerja untuk pencapaian indikator Mutu RS belum optimal
		Pengembangan Pelayanan Cathlab, Radioterapi, dan kamar bedah terpadu serta jumlah tenaga dokter spesialis dan sub masih minim	Masih terbatasnya anggaran untuk mendukung upaya pengembangan pelayanan serta sedikitnya minat dokter untuk mengabdikan diri di RSUD Tarakan Kaltara

Demikianlah pemaparan pokok masalah, masalah dan akar masalahnya. Berbasis dua hal tersebut dapat dikembangkan indikasi tujuan/sasaran, program dan kegiatan. Meskipun demikian untuk merumuskan isu-isu strategis, diperlukan telaah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS).

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yaitu:

“Terwujudnya Provinsi Kalimantan Utara yang Berubah, Maju dan Sejahtera”

Untuk mewujudkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026 tersebut, maka telah dirumuskan 14 (empat belas) Misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisien, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasis kinerja.
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasis Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan.
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
5. Mewujudkan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan.
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan konektivitas antar kabupaten/kota.
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinekaan di provinsi Kalimantan Utara.

8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah.
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Melinial dalam pembangunan.
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM.
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota.
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu. Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Setelah mengidentifikasi visi dan misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2026, UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara mendukung dan berkontribusi dalam pelaksanaan misi ke-3 (ketiga) yaitu mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan. Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara berperan dalam mewujudkan agenda prioritas 7 (tujuh) yaitu Peningkatan kualitas sumber daya manusia sehat, dan prioritas 10 (sepuluh) yaitu Mewujudkan pemberian tunjangan perbaikan penghasilan bagi aparat desa dan RT, tenaga pendidikan, dan kependidikan pada semua

tingkatan satuan pendidikan, tenaga kesehatan serta tenaga honorer di daerah perbatasan, pedalaman dan terpencil serta perkotaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian Kesehatan

Visi Nasional pembangunan jangka panjang adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia serta masyarakat yang makin sejahtera dalam pembangunan yang berkelanjutan didorong oleh perekonomian yang makin maju, mandiri, dan merata di seluruh wilayah didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai serta makin kokohnya kesatuan dan persatuan bangsa yang dijiwai oleh karakter yang tangguh dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diselenggarakan dengan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta menjunjung tegaknya supremasi hukum.

Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan.

Guna mewujudkan Misi Presiden dalam Bidang Kesehatan Tahun 2020-2024, Kementerian Kesehatan menetapkan 5 (lima) Tujuan Strategis, yakni:

1. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup
2. Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan
3. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4. Peningkatan sumber daya kesehatan

5. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif.

Dalam rangka mencapai 5 (lima) Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan tersebut di atas, ditetapkan 8 (delapan) Sasaran Strategis sebagai berikut:

Tabel. 3.2. 8 (delapan) Sasaran Strategis

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
1	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup	1	Meningkatnya kesehatan ibu, anak dan gizi masyarakat
2	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	2	Meningkatnya ketersediaan dan mutu fasyankes dasar dan rujukan
3	Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat	3	Meningkatnya pencegahan dan Pengendalian penyakit serta pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat
4	Peningkatan sumber daya kesehatan	4	Meningkatnya akses, kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan
		5	Meningkatnya pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar
		6	Terjaminnya pembiayaan kesehatan
5	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan inovatif	7	Meningkatnya sinergisme pusat dan daerah serta meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

No	Tujuan Strategis	No	Sasaran Strategis
		8	Meningkatnya efektivitas pengelolaan litbangkes dan sistem informasi kesehatan untuk pengambilan keputusan

Kebijakan dan strategi pembangunan kesehatan Kementerian Kesehatan 2020-2024 memberikan arahan bagi seluruh daerah (provinsi/kabupaten/kota) di dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang kesehatan. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan Renstra UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK, yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan yang memenuhi SPM.
2. Penyediaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana kesehatan di UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK sesuai dengan SPM sehingga mampu menciptakan hasil yang terbaik untuk masyarakat dan diperolehnya derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi setiap orang.
3. Meningkatkan pemenuhan SDM Kesehatan dan kompetensi sesuai standar.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara

Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara merumuskan tujuan yang ingin dicapai berdasarkan jenjang layanan Dinas Kesehatan dan sistem tata kelola yang diperlukan untuk menghasilkan layanan prima yaitu ***“Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat Yang Berkualitas dan Merata”***.

strategi dan arah kebijakan selama 5 (Lima) tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel. 3.3. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan
Tahun 2021-2026**

VISI (RPJMD)	: TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA		
MISI KE 3 (RPJMD)	: Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhlak mulia, produktif dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Layanan Kesehatan yang berkualitas dan merata	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya Status Kesehatan Ibu dan Anak 2. Meningkatnya Perluasan Akses dan Mutu serta Pemerataan Pelayanan Kesehatan Berkualitas 3. Menurunnya angka kesakitan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan fasilitas elayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi 2. Penyediaan layanan kesehatan untuk UKP rujukan, UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi 3. Penyelenggaraan sistem informasi kesehatan secara terintegrasi 4. Penerbitan izin Rumah Sakit kelas B dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah provinsi 5. Pengadaan Alat Kesehatan RS

				<p>6. Pembangunan Gedung Bedah Central dan Jantung Terpadu serta Radioterapi</p> <p>7. Pengadaan SIMRS yang terintegrasi</p> <p>8. Menjadikan UPTD RSUD dr. Jusuf SK Provinsi Kaltara Rumah Sakit Tipe A</p> <p>9. Pengadaan Kebutuhan Mesin Oksigen Generator untuk penanganan Covid - 19</p> <p>10. Pengembangan Pelayanan dengan mengusulkan pengaduan Alat Cathlab dan Radioterapi</p>
			2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	<p>1. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP provinsi (Dokter Spesialis dan Sub Spesialis)</p> <p>2. Pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia kesehatan tingkat daerah provinsi</p>
			3. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan	<p>1. Penerbitan pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang dan cabang</p>

			minuman	Penyalur Alat Kesehatan (PAK) 2. Penerbitan izin usaha kecil obat tradisional (ukot) 1. Advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah provinsi 2. Pelaksanaan Komunikasi informasi dan Edukasi (KIE) perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka promotif preventif tingkat daerah provinsi 3. Pengembangan dan pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah provinsi
			4. Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	

Penyusunan Renstra UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2026 dilakukan dengan mengikut sertakan berbagai unsur di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara serta pemangku kepentingan terkait lainnya. Program prioritas untuk mendukung pelayanan Dinas Kesehatan, dan kegiatan yang akan dilaksanakan Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan Provinsi Kalimantan Utara pada periode Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Adapun telaahan terhadap Renstra Dinas Kesehatan Kota Tarakan sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Kota Tarakan dalam penyusunan Renstra 2021-2026 menetapkan tujuan yaitu Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya saing. Adapun sasaran program dan indikator kinerja sasaran dari upaya pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan, dengan indikator pencapaian SPM Kesehatan 100 % dan pemenuhan sumber daya kesehatan sesuai kebutuhan sampai dengan tahun 2019 sebesar 75% serta meningkatkan capaian program kesehatan masyarakat sebesar 75%;
2. Meningkatnya Indeks Pelayanan Publik, dengan indikator pencapaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah memperoleh nilai BB dan Persentase Laporan Hasil Pemeriksaan ditindaklanjuti sebesar 90%;
3. Meningkatnya Kepesertaan UHC, dengan indikator pencapaian kepesertaan masyarakat kota tarakan yang mempunyai kartu jaminan kesehatan sebesar 100%.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Utara adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan. Implikasi RTRW menjadi pedoman dalam pembangunan dan rujukan bagi penyusunan RPJPD dan RPJMD. Secara khusus implikasi RTRW di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara dengan tugas pokok melaksanakan

urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah diantaranya dalam pengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan dalam hal ini rencana pembangunan Rumah Sakit serta rujukan bagi penyusunan rencana penanggulangan bencana. Beberapa permasalahan dan isu strategis dalam KLHS sedikit banyak juga memberikan implikasi pada pelaksanaan program kegiatan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Utara. Kebijakan pola ruang dan struktur ruang RTRW, isu strategis KLHS serta rekomendasi yang diberikan dapat dilihat pada tabel 3.4 berikut:

Tabel 3.4
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis

No	Hasil RTRW/KLHS Terkait dengan Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan	Permasalahan Pelayanan RSUD Tarakan	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	2	3	4	5
	RTRW :			
1	Pemeliharaan dan perwujudan kelestarian fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dengan strategi mengarahkan kawasan rawan bencana sebagai kawasan lindung	Melaksanakan fungsi perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan serta sumber daya kesehatan.	Pengembangan prasarana lingkungan permukiman untuk meningkatkan kualitas keterpaduan sistem penyediaan pelayanan regional untuk air bersih, persampahan, drainase dan limbah merupakan faktor pendorong dalam pelaksanaan program kegiatan di Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan	Kebijakan dan strategi RTRW dalam pengembangan kawasan lindung dan budidaya memberikan dampak positif bagi bidang kesehatan dalam mengurangi dampak akibat bencana sehingga menjadi faktor pendorong

			Utara	
	KLHS :			
1.	mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	3.	mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya	

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan utama yang disepakati untuk dijadikan prioritas penanganan selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang karena memiliki dampak yang signifikan bagi daerah dan masyarakat. Adapun berdasarkan hasil telaah atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, telaah Renstra Kementerian Kesehatan dan Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (RTRW dan KLHS), maka isu strategis UPTD RSUD dr. H. Jusuf SK Kalimantan Utara adalah sebagai berikut :

1. Penanganan pandemi dan pasca pandemi Covid-19.
2. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS dan TB) yang masih tinggi serta meningkatnya penyakit tidak menular yang disebabkan oleh pola hidup tidak sehat. Prevalensi penyakit menular utama (HIV/AIDS, tuberkulosis dan malaria) masih tinggi disertai dengan ancaman *emerging diseases* akibat tingginya mobilitas penduduk. Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, tekanan darah tinggi, dan masih tingginya merokok serta kurangnya aktivitas fisik, sehingga penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes meningkat.
3. Distribusi tenaga kesehatan yang belum merata, baik dalam jumlah maupun jenis tenaga dikarenakan tenaga kesehatan hanya terkonsentrasi di pusat kota.
4. Sistem rujukan pelayanan kesehatan masih belum optimal yang dilihat dari masih banyaknya antrian pasien di fasilitas pelayanan Kesehatan.
5. Masih banyak aplikasi sistem informasi yang digunakan tetapi tidak saling terintegrasi.
6. Implementasi regulasi mutu pelayanan RS sesuai akreditasi SNARS belum optimal.

7. Pengembangan pelayanan kesehatan *Cathlab*, Radioterapi, dan kamar bedah terpadu serta jumlah diperlukannya tenaga dokter spesialis dan sub-spesialis masih kurang.